

NAMA MEDIA : Jawa Pos
TANGGAL : 7 Januari 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

Kerentanan Korupsi dan Kesejahteraan Prajurit Perlu Jadi Perhatian

Empat poin itu terdiri atas pemberantasan korupsi dalam pengadaan alat pertahanan keamanan serta kesejahteraan personel TNI dan Polri. Lalu pembangunan kekuatan pertahanan dan keberlanjutan visi poros maritim dunia.

Anton mengatakan, pemberantasan korupsi terkait dengan pengadaan alat pertahanan dan keamanan sangat penting. Survei risiko korupsi sektor pertahanan yang dilakukan Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia masuk kategori tingkat risiko korupsi tinggi untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan. "Government Defence Integrity Index tahun 2015 dan 2020 tetap memasukkan Indonesia dalam kategori D," ungkap Anton kepada *Jawa Pos*.

Hal tersebut tidak terlepas dari pengadaan alat pertahanan dan keamanan yang sering kali dikaitkan dengan

Untuk menjauhkan para prajurit TNI dan personel Polri dari tindakan melawan hukum seperti korupsi, kesejahteraan menjadi sangat penting. Karena itu, kesejahteraan seluruh prajurit TNI dan personel Polri tidak boleh luput dari debat malam ini.

Ketiga paslon mengangkat poin tersebut dalam dokumen visi dan misi yang sudah mereka serahkan kepada KPU. Namun, tidak ada satu pun yang mengelaborasi poin tersebut secara lebih

Karena itu, Reza (sapaan Teuku Rezasyah) menyoroti empat poin yang dinilai perlu mendapat sorotan dalam debat pilpres malam ini. Pertama, terkait evaluasi atas kemampuan Indonesia mengamankan kedaulatannya di darat dan laut dari berbagai kegiatan yang melawan hukum serta upaya meningkatkan kemampuan tersebut di masa depan.

Kedua, evaluasi atas ketokohan Indonesia di ASEAN dan mengantisipasi menu-

kerahasiaan. Kondisi itu menyebabkan pengadaan di sektor tersebut menjadi rawan korupsi. Karena itu, Anton menilai pemberantasan korupsi di sektor pertahanan dan keamanan perlu menjadi atensi bagi seluruh capres. "Pemberantasan korupsi di sektor hankam (pertahanan dan keamanan, Red) menjadi krusial dibahas dalam debat mengingat tidak ada satu pun dokumen visi-misi capres yang menyinggung isu ini," terang dia.

runnya kredibilitas ASEAN saat menghadapi rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok. Ketiga, hikmah dari perang di perbatasan antara Rusia-Ukraina bagi kebijakan pengamanan perbatasan Indonesia di masa depan. Terakhir, mengenai kebijakan jangka panjang Indonesia bagi penguatan struktur PBB demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional yang lebih baik dan berkeadilan.

terperinci. Misalnya soal kebijakan terukur guna menjamin kesejahteraan bagi prajurit TNI dan personel Polri.

Sementara itu, pengamat hubungan internasional Teuku Rezasyah mengungkapkan, sejatinya pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik itu terintegrasi. Tidak terpisahkan satu sama lain. Sehingga tak bisa membiarkan pertahanan dan keamanan tanpa menyinggung hubungan internasional maupun geopolitik.

Selain itu, krisis di Myanmar perlu segera diram-pungkan. Karena ini berkaitan erat dengan nasib etnis Rohingya yang kini mengungsi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Para capres, kata Reza, perlu menaruh perhatian penuh atas isu ini. "Karena masalah Myanmar ini sudah menyandera ASEAN sejak lama.

Kredibilitas ASEAN jadi tanggung lantaran masih menyimpan masalah yang menjadi keprihatinan dunia," sambungnya. (syn/mia/c9/fal)